

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020



KABUPATEN FLORES TIMUR
2021

KATA PENGANTAR

Syukur dan pujian patut dinaikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Instansi pemerintah dituntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menggambarkan tingkat capaian kinerja yang dalam penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan juga untuk mengembangkan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban tentang kinerja OPD selama tahun 2020. Hasilnya diharapkan dapat menjadi media akuntabilitas dan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah secara akuntabel kepada publik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta. Atas bantuan dan kerjasamasesemuapihak yang telah mendukung penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2020, disampaikan limpah terimakasih.

Larantuka, 11 Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

MIKHAEL BULET RURON,SH,M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630329 199003 1 004

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberian hak untuk mengatur rumah tangga daerah masing-masing (otonomi daerah) pada hakekatnya mengandung prinsip kedaulatan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan keadilan seperti tertuang dalam amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut harus diwujudkan oleh sebuah daerah otonom seperti halnya Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas perencanaan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat di sektor transportasi. Dalam mempermudah pelaksanaan tugas pelayanannya kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu membentuk berbagai organisasi baik organisasi pemerintahan maupun kemasyarakatan yang memiliki korelasi adanya pola kemitraan yang nyata sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang memiliki tujuan akhirnya yaitu terwujudnya good governance.

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Organisasi Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terbentuk dengan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 memiliki dukungan potensi sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas yang variatif siap mendukung upaya pembangunan di sektor transportasi serta tugas pelayanan kepada masyarakat secara maksimal berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang ada.

B. GAMBARAN SINGKAT DINAS PERHUBUNGAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur
Dalam upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan untuk melaksanakan visi dan misinya maka, Kabupaten Flores Timur mengemban Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
 - a) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala

Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- c) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) tersebut diatas menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut :
 - Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
 - Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan.

2. Organisasi

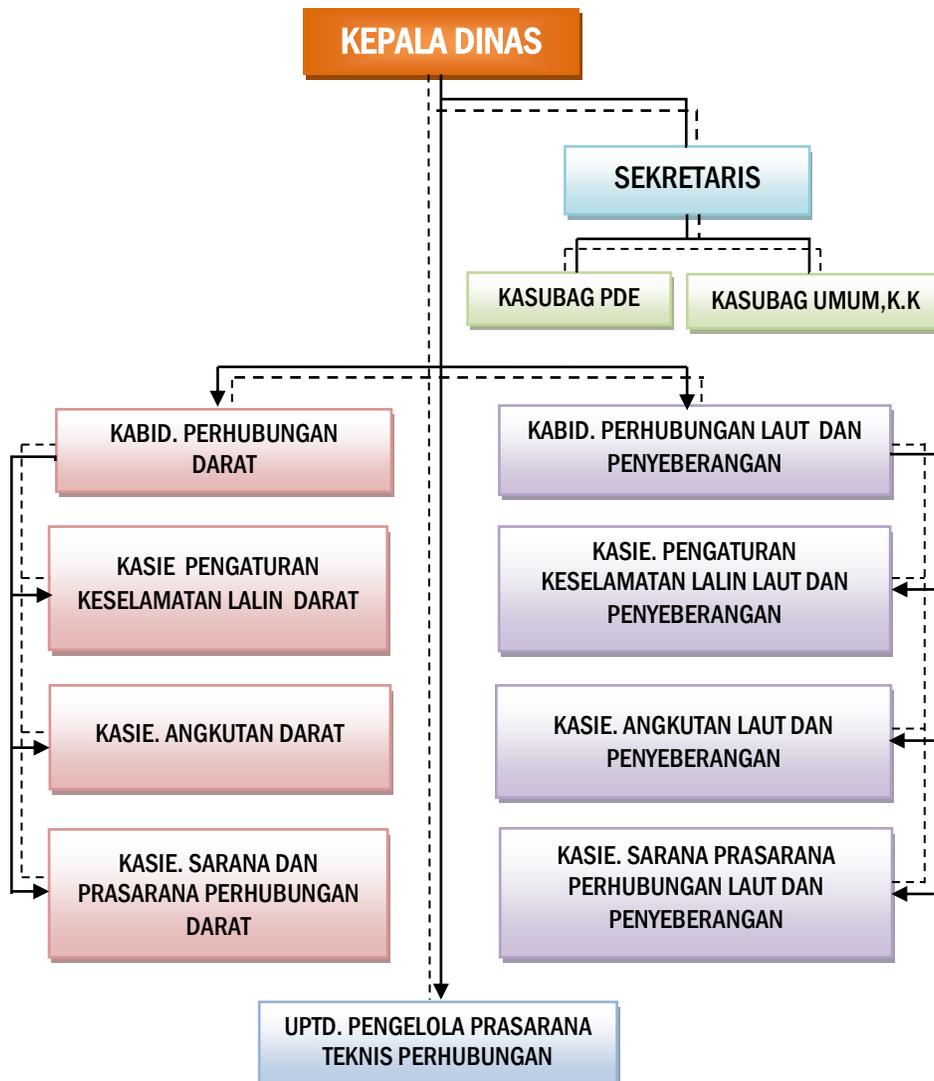
Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur terdiri dari unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan , Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- c. Pelaksana adalah Bidang dan Seksi dan Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari :
 - 1) Bidang Perhubungan Darat :
 - Seksi Pengaturan Keselamatan Lalulintas Darat.
 - Seksi Angkutan Darat.
 - Seksi Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat.
 - 2) Bidang Perhubungan Laut dan Penyeberangan.
 - Seksi Pengaturan Keselamatan Lalulintas Laut dan Penyeberangan.
 - Seksi Angkutan Laut dan penyeberangan.
 - Seksi Prasarana Sarana Perhubungan Laut dan Penyeberangan.
 - 3) UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur bedasarkan Peraturan Bupati Nomor : 79 Tahun

2018 Tanggal 28 Desember 2018 : Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
(Peraturan Bupati Nomor :79 Tahun 2018)**



Keterangan :

- ▶ : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

3. Sumber Daya Aparatur Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran. Data jumlah sumber daya perhubungan menurut eselon, pangkat / golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi menurut golongan / ruang :

| No | Golongan / Ruang | L | P | Jumlah |
|----|------------------|----|---|--------|
| | Golongan IV.c | 1 | - | 1 |
| | Golongan IV.b | 1 | | 1 |
| | Golongan IV.a | 1 | 1 | 2 |
| | Golongan III.d | 3 | 1 | 4 |
| | Golongan III.c | 3 | - | 3 |
| | Golongan III.b | 1 | - | 1 |
| | Golongan III.a | 8 | 2 | 10 |
| | Golongan II.d | 1 | - | 1 |
| | Golongan II.c | 12 | 3 | 15 |
| | Golongan II.b | 1 | - | 1 |
| | Golongan II.a | - | - | - |
| | Golongan I.d | 1 | - | 1 |
| | Golongan I.c | - | - | - |
| | Golongan I.b | 1 | - | 1 |
| | Golongan I.a | - | - | - |
| | | | | |

b. Klasifikasi menurut tingkat pendidikan :

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | | NON PNS | | Jumlah |
|----|--------------------|-----|---|---------|---|--------|
| | | L | P | L | P | |
| | S2 | 2 | - | - | - | 2 |
| | S1 / D.IV | 5 | 2 | - | - | 7 |
| | Diploma III | 6 | - | - | - | 6 |
| | Diploma II | - | - | - | - | - |
| | Diploma I | - | - | - | - | - |
| | SMA Sederajat | 19 | 5 | - | - | 24 |
| | SMP Sederajat | 1 | - | - | - | 1 |
| | SD | 1 | - | - | - | 1 |
| | | | | | | |

c. Klasifikasi menurut jabatan struktural / fungsional :

| No | Jabatan Struktural | L | P | Jumlah |
|----|--------------------|---|---|--------|
| | Eselon II.b | 1 | - | 1 |
| | Eselon III.a | 1 | - | 1 |
| | Eselon III.b | 1 | 1 | 2 |
| | Eselon IV.a | 5 | 2 | 7 |
| | | | | |

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI OPD DINAS PERHUBUNGAN.

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pelayanan masyarakat di sektor transportasi sangat erat hubungannya dengan perannya dalam mendukung pencapaian pembangunan pada sektor yang lain. Ada beberapa permasalahan penting yang dihadapi Kabupaten Flores Timur di sektor transportasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Perhubungan Darat :

- Perlunya adanya pelaksanaan uji kir untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan.
- Jumlah unit peralatan pengujian kendaraan yang tersedia masih minim dan tidak dapat dioperasikan karena rusak sehingga memerlukan proses pemeliharaan.
- Sumber daya manusia di bidang perhubungan yang memenuhi standar kompetensi masih minim. Tenaga penguji kendaraan bermotor belum memenuhi standar kompetensi penguji. Disamping itu juga perlu adanya aparatur PPNS bidang perhubungan.
- Dampak ikutan tidak adanya kegiatan uji kir kendaraan maka buku Uji Kendaraan, Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan tidak dapat diterbitkan.
- Infrastruktur perhubungan darat baik itu fasilitas terminal maupun perlengkapan jalan (lampu penerangan jalan, rambu-rambu, guardrail) masih minim.
- Belum adanya peraturan lokal yang mengatur tentang kendaraan tidak dalam trayek (taxi bandara dan mobil travel).

- Perlu adanya penataan kembali rute dan trayek angkutan kota Larantuka.
 - Masih minimnya jumlah halte di luar kota Larantuka.
2. Bidang Perhubungan Laut dan Penyeberangan :
- Perlu adanya unit kelembagaan khusus yang mengelola pelabuhan lokal (jembatan tambatan perahu dan pelabuhan penyeberangan).
 - Armada kapal laut yang melintasi antar pelabuhan dalam kabupaten perlu dilakukan penataan baik trayek, dokumen kapal dan awak serta pengawasan terpadu terhadap kondisi fisik kapal.
 - Ada jembatan tambatan perahu yang belum dikelola.
 - Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang perijinan di bidang angkutan laut dan pelayaran rakyat terkait (ijin usaha angkutan laut / pelayaran rakyat).

D. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 dengan memperhatikan regulasi yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur;
8. Peraturan Bupati Nomor : 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor :89);
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
10. Peraturan Bupati Nomor : 22 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur
11. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan tahun 2020, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran singkat Dinas Perhubungan
- C. Dasar Hukum
- D. Isu Strategi
- E. Sistematika Penyusunan LKIP Tahun 2020

Perencanaan Kinerja

- A. Perencanaan
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Penetapan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Penutup

Lampiran – Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis organisasi Dinas Perhubungan dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022. Visi Misi Kepala Daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan Visi dan Misi Dinas Perhubungan.

- a. Visi : Terwujudnya system layanan jasa transportasi, yang berkualitas menuju masyarakat Flores Timur sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata.
- b. Misi : Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang akan dicapai melalui Dinas Perhubungan pada periode rencana strategi / Renstra Tahun 2018– 2022, sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi.
 - 2) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang Perhubungan.
 - 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di bidang Perhubungan.

Tujuan dan Sasaran

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi
- b. Meningkatkan kualitas SDM bidang Perhubungan.
- c. Meningkatkan Pelayanan Jasa Angkutan.
- d. Meningkatkan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
- e. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana bidang perhubungan yang berkualitas.

Sasaran :

- a. Meningkatnya peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi.
- b. Meningkatnya kualitas SDM bidang Perhubungan.
- c. Meningkatnya pelayanan jasa angkutan.
- d. Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
- e. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana bidang perhubungan yang berkualitas.

Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan bagian penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Perhubungan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Adanya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di bidang perhubungan baik di kawasan pedesaan maupun di perkotaan terutama upaya perbaikan infrastruktur perhubungan guna mendukung pelayanan jasa transportasi.
2. Mobilisasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya semakin tinggi memberi dampak kepada penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
3. Semakin tingginya perkembangan teknologi, yang mendorong penggunaan teknologi oleh masyarakat untuk mengakses informasi pelayanan jasa angkutan.
4. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur bidang perhubungan yang telah dibangun pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pemerintah Desa.
5. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya aparatur perhubungan yang berkompeten di bidang perhubungan.

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, maka langkah – langkah indikatif dan arah tindakan yang menjadi pedoma OPD Dinas Perhubungan selama periode Renstra tahun 2018 – 2022 ditetapkan sebagai berikut :

a. Strategi :

- Mengembangkan peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi.
- Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan.
- Mengembangkan pelayanan jasa angkutan.

b. Kebijakan :

- Pengembangan peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi.
- Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Perhubungan.
- Pengembangan pelayanan jasa angkutan.

c. Program dan Kegiatan :

Program adalah kegiatan-kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu serta saling berkaitan yang dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun melalui kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran. Adapun program / kegiatan Dinas Perhubungan adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Kantor

- * Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- * Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- * Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- * Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- * Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- * Penyediaan Alat Tulis Kantor
- * Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan

- * Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - * Penyediaan Makanan Dan Minuman
 - * Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
 - * Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Dan Teknis Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- * Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - * Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - * Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - * Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- * Pendidikan Dan Pelatihan Formal
- 4) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- * Penyusunan Laporan Capaian Kerja, Realisasi Keuangan Dan Laporan Tahunan.
- 5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- * Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- * Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal / pelabuhan
 - * Rehabilitasi dan Peningkatan Terminal Angkutan Darat
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- * Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
 - * Fasilitas Perijinan dibidang Perhubungan
 - * Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - * Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan
 - * Pengawasan Lalu Lintas Kapal Laut Dan Muatan Dalam Batas Bandar.

8) Program Pengendalian dan Pengamanan lalulintas

- * Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
- * Pengawasan Lalulintas dan Kegiatan Keagamaan

9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

- * Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- * Pengujian Kendaraan Bermotor.

d. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan rencana kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran. Adapun rencana kerja anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2020 adalah :

PENDAPATAN

| NO | Uraian Pendapatan | Target (Rp) |
|----|--------------------------------------|-------------|
| 1. | Hasil Retribusi daerah dan lain-lain | 211.322.000 |

BELANJA TIDAK LANGSUNG

| NO | Uraian | Pagu Dana (Rp) |
|----|-----------------|------------------|
| 1. | Belanja Pegawai | 2.455.839.314,40 |

BELANJA LANGSUNG

| NO | Uraian | Pagu Dana (Rp) |
|----|---|----------------|
| I. | Pelayanan Administrasi Kantor | |
| | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.248.000 |
| | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 20.400.000 |
| | 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 5.750.000 |
| | 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 41.206.000 |
| | 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 10.168.125 |
| | 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor | 29.095.461 |
| | 7. Penyediaan Barang Cetak Dan | 11.745.000 |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | | Penggandaan | |
| | 8. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 13.198.000 |
| | 9. | Penyediaan Makanan Dan Minuman | 18.000.000 |
| | 10 | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi | 139.827.000 |
| | 11 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Dan Teknis | 625.600.000 |
| II. | Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | | |
| | 1. | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasionala | 82.263.000 |
| | 2. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 67.125.000 |
| | 3. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 48.000.000 |
| | 4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 44.326.000 |
| | 5. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 143.734.000 |
| | 4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor | 2.600.000 |
| III. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | |
| | 1. | Pendidikan dan Pelatihan formal | 11.837.000 |
| IV. | Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | |
| | 1. | Penyusunan Laporan capaian Kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan | 39.211.000 |
| V. | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | |
| | 1. | Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan sungai danau dan penyeberangan | 35.969.450 |
| VI | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | |
| | 1. | Rehabilitasi Terminal / Pelabuhan | 56.165.920 |
| | 2. | Rehabilitasi dan Peningkatan Terminal Angkutan Darat | 499.327.000 |
| VI | Peningkatan Pelayanan Angkutan | | |
| | 1. | Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya | 33.886.000 |
| | 2. | Fasilitas Perijinan Di Bidang Perhubungan | 21.655.000 |

| | | | |
|-----|----|---|-------------|
| | 3. | Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan | - |
| | 4. | Koordinasi dalam peningkatan Pelayanan Angkutan | 27.488.000 |
| | 5. | Pengawasan Lalu Lintas Kapal Laut Dan Muatan Dalam Batas Bandar | 44.394.500 |
| VII | | Pengendalian dan Pengamanan lalulintas | |
| | 1. | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan | 35.329.000 |
| | 2. | Pengawasan Lalulintas Dan Kegiatan Keagamaan | 26.950.000 |
| IX | | Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. | |
| | 1. | Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor | 201.162.000 |
| | 2. | Pengujian Kendaraan Bermotor | 19.135.000 |

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan sebuah pernyataan keseriusan sebuah instansi pelaksana program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi / lembaga / unit kerja / satuan kerja dengan Bupati Flores Timur. Substansi daripada perjanjian kinerja ini mempunyai muatan tanggung jawab instansi / lembaga / unit kerja / satuan kerja untuk dapat mencapai target kinerja sesuai perencanaan. Proses penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta penjabaran program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan OPD pada tahun yang bersangkutan dengan dukungan sejumlah anggaran yang dirinci secara detail pada masing – masing kegiatan. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai bukti keseriusan pelaksanaan tugas oleh OPD penyelenggara program dan kegiatan maka dibuatlah perjanjian kinerja antara Bupati Flores

Timur dengan Kepala Dinas Perhubungan. Adapun perjanjian kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat dalam lampiran LKIP ini. (terlampir)

C. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen organisasi yang baik. Rencana kinerja akan menjadi pedoman bagi pemegang kendali manajemen organisasi dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diharapkan, dan dapat digunakan sebagai alat kontrol apakah organisasi telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai perencanaan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam tahun anggaran berjalan perlu dimasukkan dalam dokumen penetapan rencana kinerja tahunan. Pada tahun 2020, Dinas Perhubungan akan melaksanakan 9 program dan 31 kegiatan yang tersebar di tiga bidang dan dua sub bagian pada sekretariat dinas. Program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan dalam tahun anggaran 2020 disertakan dengan dukungan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan – kegiatan dimaksud agar dapat terealisasi secara baik pada tahun 2020. Rincian jumlah program dan kegiatan tahun 2020 dapat terekam dalam Tabel Penetapan Kinerja (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan /kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan /kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggung jawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas Perhubungan adalah Renstra OPD dan Penetapan Kinerja 2020.

Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, menetapkan 7 sasaran strategis yang ingin diwujudkan/dicapai, antara lain :

1. Meningkatnya peran dan fungsi prasarana dan sarana transportasi
2. Meningkatnya kualitas SDM bidang Perhubungan.
3. Meningkatnya kesadaran berlalulintas bagi pengguna jalan.
4. Terciptanya keamanan, kenyamanan sarana transportasi laut
5. Pencegahan terhadap kecelakaan transportasi laut.
6. Meningkatnya fungsi peralatan pengujian kendaraan bermotor.
7. Meningkatnya pelayanan jasa angkutan.

Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap berusaha untuk memanfaatkan sumber daya, anggaran dan sarana yang ada dengan baik dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dengan dukungan anggaran dan sumber daya aparatur yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2020 telah mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Analisis tingkat keberhasilan (capaian kinerja) pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 dan perbandingan pencapaian pada tahun sebelumnya untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis secara terperinci dijabarkan menurut misi organisasi dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Visi : *Terwujudnya system layanan jasa transportasi, yang berkualitas menuju masyarakat Flores Timur sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata.*

Misi 1 : *Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi.*

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN | | TAHUN 2020 | | |
|--|---|---------------------|---------|------|------------|-----------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Terciptanya keamanan kenyamanan sarana transportasi dan pencegahan terhadap kecelakaan transportasi. | Meningkatnya pengelolaan terminal angkutan sungai danau dan penyeberangan | bulan | 100% | 100% | 12 | 12 | 100% |
| | Meningkatnya kesadaran pengemudi untuk disiplin berlalu lintas | Lokasi | 100% | 100% | 12 | 12 | 100% |
| | Terlaksananya pelayanan perijinan angkutan darat | Dokumen ijin trayek | 100% | 50% | 35 | 2 | 5.71% |

| | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|-----|----|------|
| | Terlaksana nyasosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan. | Kali | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | Terlaksananya rapat koordinasi teknis bidang perhubungan | kali | 100% | - | 6 | 6 | 100% |
| | Terlaksananya pengawasan kapal, muatan dan dokumen shipeer | Kali | 100% | 100% | 12 | 12 | 100% |
| Terciptanya kesadaran berlalulintas bagi pengguna jalan | Terlaksananya pengawasan dan pengendalian arus lalulintas pada hari-hari besar keagamaan. | Kali | 100% | 100% | 12 | 12 | 100% |
| Meningkatnya kelayakan peralatan pengujian kendaraan bermotor. | Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor | Kali | 0% | 0% | 630 | 0 | 0% |

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020, Dinas Perhubungan melaksanakan satu kegiatan pelayanan di bidang Perhubungan Laut dan Penyeberangan yaitu pengelolaan pelabuhan penyeberangan Deri dan Lohayong dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 35.969.450 dengan realisasi Rp. 35.969.000 atau capaiannya 99 %. Realisasi capaian pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 100% dan tahun 2020 realisasinya 12 bulan atau capaian 100%.
2. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dengan indikator kegiatan meningkatnya kesadaran pengemudi untuk disiplin berlalu lintas pada 5 lokasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 33.886.000. dengan realisasi anggaran Rp. 33.886.000. capaian kinerja anggaran 100% dan kinerja kegiatan 5 lokasi terhadap target 5 lokasi operasi gabungan atau capaian kinerja kegiatannya mencapai 100%. Kegiatan ini dapat dilakukan

secara baik dengan pengamanan yang melibatkan instansi terkait yaitu Satlantas Polri.

3. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan dengan indikator kegiatan terlaksananya pelayanan perijinan angkutan darat menargetkan dapat memfasilitasi pengurusan dokumen ijin trayek sebanyak 35 ijin trayek dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 21.655.000. dengan realisasi anggaran Rp. 21.655.00 atau capaian kinerja anggaran 100%. Namun realisasi kinerja kegiatan 2 dokumen ijin (kendaraan baru) dari target 35 dokumen ijin trayek (5.71%). Hal yang menyebabkan pencapaian sangat minim adalah :
 - o Adanya peralihan sistem pengaturan pemberian ijin trayek dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 yang mewajibkan setiap kendaraan angkutan umum harus berbadan hukum PT / Koperasi / BUMN / BUMD.
 - o Dampak ikutan dari pada tidak dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor. Pada prinsipnya kendaraan yang memiliki ijin trayek harus laik jalan yang melalui proses pemeriksaan berkala kendaraan dengan masa aktif yang tertera dalam buku uji kendaraan.
4. Sosialisasi / Penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan dengan indikator merningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 0 dengan realisasi anggaran Rp.0 kegiatan ini tidak dapat dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja 0%. Kegiatan ini tidak dilakukan di Kecamatan Solor Selatan, Titehena dan Adonara Timur karena Pandemi Covid 19. Pada tahun 2018 dan 2019 juga dilaksanakan masing-masing 3 kali atau capaian 100%.
5. Rapat koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan. Pada tahun 2018 dilaksanakan 6 kali sedangkan di tahun 2019 Dinas Perhubungan tidak melibatkan diri dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi karena alasan ketiadaan anggaran. Pada tahun 2019, kegiatan rapat koordinasi teknis bidang perhubungan dilakukan sebanyak 6 kali dari target 6 kali kegiatan atau capaian kinerja kegiatan mencapai 100%. Capaian kinerja

anggaran 100 % dari target Rp.27.488.000 dan realisasi Rp.27.488.000.

6. Kegiatan Pengawasan lalulintas kapal dan muatan dalam batas bandar. Kegiatan ini menjadi porsi tugas bidang Perhubungan Laut dan penyeberangan dengan target pasti setiap tahunnya adalah 12 kali melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas di pelabuhan, baik itu bongkar muat barang / orang maupun pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas pelabuhan. Tahun 2018 dan tahun 2019, capaian kinerjanya mencapai 100%. Pada tahun 2020, target anggaran sebesar Rp. 44.394.500 dengan serapan anggaran Rp. 44.394.500 atau 100 %.
7. Pengawasan Lalulintas dan Kegiatan Keagamaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut dan Penyeberangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2020 dengan dukungan anggaran sebesar Rp.26.950.000, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 26.950.000 atau 100 %. Target output dari kegiatan ini adalah frekuensi kegiatan pengawasan lalulintas dan kegiatan keagamaan yang dilakukan berjumlah 12 (dua belas) kali, dan realisasi 5 (lima) kali atau capaian kinerja 50 %. kegiatan ini tidak dilaksanakan semaksimal mungkin karena adanya Pandemi Covid 19 maka kegiatan Samana Santa tidak dapat dilaksanakan. ketersediaan anggaran dan dukungan sumber daya manusia Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut dan Penyeberangan sebagai pelaksana kegiatan sehingga dapat terealisasi dengan baik. Kegiatan yang sama pada tahun 2018 dan 2019 juga dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 100% dari target 12 kali pengawasan.
Capaian kinerja tahun sebelumnya mencapai 100% dari 12 kali pengawasan lalulintas.
Dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya maka tahun 2020 jumlah frekuensi pengawasan bertambah khusus pada kegiatan keagamaan pengawasan pada bulan kitab suci nasional dan pada pawai natal santa claus fanfare.
8. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, pada tahun 2020 tidak dilakukan uji kir karena regulasi baru terkait PM 133 Tahun 2016

tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan menghendaki setiap wilayah yang melakukan uji kendaraan harus menggunakan alat uji mekanik sehingga kegiatan uji kir untuk kendaraan tidak dilakukan. Hal ini sangat mempengaruhi target pendapatan. Pada tahun 2020 kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan oleh UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan hanya melayani permohonan ketok nomor uji baru bagi kendaraan baru, melayani rekomendasi numpang uji dan melayani surat keterangan pengganti buku uji kendaraan bagi kendaraan baru. Sedangkan substansi kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesungguhnya adalah melakukan pengujian fisik kendaraan secara keseluruhan dengan menggunakan peralatan uji mekanik sesuai amanat regulasi. Pemerintah Daerah Flores Timur dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai OPD pelaksana tugas ini masih berproses untuk melaksanakan kegiatan ini sesuai ketentuan dengan senantiasa mengharapkan dukungan anggaran dari APBD.

Misi 2 : Meningkatkan kapasitas SDM aparatur di bidang Perhubungan

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN | | TAHUN 2020 | | |
|--|---------------------------------------|--------|---------|------|------------|-----------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya kualitas SDM bidang perhubungan | Tersedianya Aparatur yang berkualitas | orang | 100% | 100% | 3 | 1 | 100% |

Analisis Capaian Kinerja terhadap tabel di atas :

Target jangka menengah yang termuat dalam dokumen rencana strategis OPD untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal adalah 21 orang. Tahun 2020 Dinas Perhubungan mengirimkan 3 orang ASN khusus pengujian kendaraan bermotor untuk mengikuti kegiatan diklat Pengujian Kendaraan Bermotor (2 orang pengujian pemula dan 1 orang pembantu pengujian) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 11.817.167, realisasi Rp.11.817.167 atau 100%. Target kinerja kegiatan 100%. Target pada tahun 2019 berjumlah 3

orang, dengan prosentase capaian mencapai 100 %, dan pada tahun 2018 jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan 8 orang, realisasi 8 orang atau prosentase capaian 100%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan capaian kinerja 2 tahun sebelumnya adalah berimbang dengan prosentase pencapaian yang sama. Keberhasilan pencapaian kinerja 3 tahun terakhir disebabkan beberapa faktor antara lain faktor umum dari dinas itu sendiri yaitu adanya semangat untuk melakukan perubahan pola pelayanan kepada masyarakat dan upaya peningkatan pembangunan di sektor perhubungan. Faktor khusus datang dari pribadi aparatur yakni adanya kesadaran aparatur akan peningkatan SDM sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dari aspek pendanaan (target input dana : Rp. 57.718.000), terealisasi Rp. 41.429.000. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dapat tercapai.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di bidang perhubungan.

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN | | TAHUN 2020 | | |
|---|---|--------|---------|------|------------|-----------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tersedianya Sarana Prasarana perhubungan yang handal dan terintegrasi | Jumlah rambu lalu lintas yang di adakan | Unit | - | 100% | 10 | 0 | 0 % |
| | Terlaksananya rehabilitasi dan peningkatan terminal pelabuhan dan Terminal Angkutan Darat | Unit | - | 1 | 2 | 2 | 100% |

Analisis Capaian Kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan .Mengacu pada indikator kegiatan yaitu jumlah Pengadaan Lampu Penerangan Jalan yang diadakan dengan target sebanyak 12 unit realisasi capaian kegiatannya adalah 0 unit atau 0 %. Pagu anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau 0%. (Kegiatan ini adalah Dana DAK yang tidak

dapat dilaksanakan karena ditarik kembali oleh Kementerian Perhubungan akibat Pandemi Covid 19, sehingga Kegiatan hanya dilaksanakan Konsultan Perencanaan dengan Anggaran sebesar Rp. 35.329.000 dengan realisasi sebesar Rp.35.329.000 atau 100%

2. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan.

Kegiatan ini dilakukan berlokasi di jembatan tambatan perahu Lamawalang dan Terminal Weri dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 499.327.000, dengan realisasi sebesar Rp. 499.327.000 atau 100%. Target kinerja kegiatan 2 unit realisasi capaian kinerja 2 unit atau 100%.

Capaian kinerja kegiatan secara umum pada tahun 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur terhadap 28 kegiatan yang relevan dengan 7 (tujuh) sasaran strategis organisasi menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi yakni 99,90 %. Hasil pengukuran kinerja sasaran dan indikator hasil dipilah menurut visi dan misi organisasi OPD seperti terlihat pada tabel di atas.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2020 telah diupayakan dilakukan secara optimal dengan dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Total pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp.4.812.635.124., Dengan detail uraian belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.455.839.314,40 untuk membiayai belanja pegawai sedangkan belanja langsung Rp. 2.356.795.810 untuk membiayai 31 (tiga puluh satu) kegiatan dari 4 (empat) program rutin dan 5 (lima) program urusan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan. Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 khusus pada belanja langsung mencapai Rp.2.234.315.810 atau prosentase capaian kinerja anggaran 99.90%. Sisa anggaran yang tidak terserap pada tahun 2020 adalah Rp. 2.280.036. Secara lebih detail, penjabaran perbandingan antara target dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel realisasi keuangan tahun 2020 terlampir.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, merupakan media akuntabilitas yang digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel. Melalui penyajian lakip ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang termuat Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur selama tahun 2020 *dinilai sangat baik* apabila dilihat dari pencapaian secara umum.

Menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin dengan membangun kesamaan persepsi dan kesatuan pemahaman terhadap semua persoalan dengan berbagai pihak yang berkompeten sehingga pada tahun – tahun mendatang pencapaian hasil akan lebih baik sesuai harapan.

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur secara umum melaksanakan 9 program dan 31 kegiatan baik program rutin maupun program urusandengan 7 sasaran yang hendak dicapai.
- b. Pengukuran capaian kinerja dipetakan menurut visi dan misi organisasi serta 7 sasaran strategis organisasi yang relevan pada 5 program 11 kegiatan dilaksanakan pada tahun 2020. *Capaian kinerja kegiatan terukur sebesar 98.86% dan capaian kinerja anggaran sebesar 99,90% (skala ordinal penilaian dinilai sangat tinggi).*
- c. Hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sudah cukup maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun ada hal yang belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan.

- d. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan karena banyak faktor diantaranya : faktor fasilitas / peralatan uji kendaraan yang tidak dapat berfungsi yang berdampak pada kehilangan sumber pendapatan asli daerah khusus pada retribusi pengujian kendaraan dan dampak ikutan pada kehilangan retribusi ijin trayek dan kartu pengawasan.

Terhadap berbagai program dan kegiatan serta kendala yang dihadapi sebagaimana terjabar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mengharapkan adanya informasi balik berupa masukan-masukan yang sifatnya konstruktif dalam berbagai kebijakan yang senantiasa dapat dilaksanakan sesuai kondisi obyektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap dimensi. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan melalui laporan ini, kiranya dapat menjadi bahan informasi / evaluasi dan kajian untuk perencanaan pembangunan kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Larantuka, 11 Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

MIKHAEL BULET RURON,SH,M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630329 199003 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN